



Kinerja Keuangan Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Rasio Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018-2023

Triestina Melani^{1✉}, Fena Nor Rohmah², Muhammad Eldafa Alghifari³, Helyen Angelina Kusfita Rossa⁴, Elvia Kharisma Putri⁵, Elsa Putri Maharani⁶, Mega Tunjung Hapsari⁷
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Abstract

Kata Kunci:

Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi; Rasio Efektivitas; Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Kabupaten Kediri dengan menggunakan analisis rasio pendapatan daerah terhadap belanja daerah selama periode 2018 hingga 2023. Dalam penelitian ini, rasio-rasio yang dianalisis meliputi rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas, serta rasio belanja langsung terhadap belanja tidak langsung. Rasio derajat desentralisasi digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya secara mandiri, yang menunjukkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap pendanaan dari pemerintah pusat. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfungsi untuk mengukur kemampuan Kabupaten Kediri dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Sedangkan, rasio belanja langsung terhadap belanja tidak langsung dianalisis untuk mengukur efisiensi dalam pengalokasian anggaran, terutama dalam mendukung kegiatan pembangunan daerah yang berdampak langsung pada masyarakat. Berdasarkan hasil analisis terhadap data selama enam tahun, diperoleh kesimpulan bahwa derajat desentralisasi Kabupaten Kediri tergolong rendah, yang menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang masih terbatas. Sementara itu, efektivitas PAD dinilai sangat tinggi dengan capaian yang konsisten memenuhi target. Namun, rasio belanja langsung terhadap belanja tidak langsung menunjukkan proporsi yang kurang optimal, sehingga pengalokasian anggaran dinilai belum efisien dalam mendukung kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Key Words:

Regional Financial Performance, Decentralization Degree Ratio; Effectiveness Ratio; Direct and Indirect Expenditure Ratio.

This study aims to evaluate the financial performance of Kediri Regency by using the ratio analysis of regional income to regional expenditure during the period 2018 to 2023. In this study, the ratios analyzed include the ratio of the degree of decentralization, the effectiveness ratio, and the ratio of direct expenditure to indirect expenditure. The degree of decentralization ratio is used to assess the region's ability to finance its needs independently, which shows the extent of the region's dependence on funding from the central government. The effectiveness ratio of local revenue (PAD) serves to measure the ability of Kediri District to achieve the predetermined revenue target. Meanwhile, the ratio of direct expenditure to indirect expenditure is analyzed to measure efficiency in budget allocation, especially in supporting regional development activities that have a direct impact on society. Based on the analysis of six years of data, it was concluded that the degree of decentralization in Kediri District was low, indicating a limited level of financial independence. Meanwhile, the effectiveness of regional own-source revenue (PAD) is considered very high with achievements that consistently meet the target. However, the ratio of direct expenditure to indirect expenditure shows a less than optimal proportion, so that budget allocations are considered inefficient in supporting activities that have a direct impact on society.

Corresponding Penulis :

Alamat: UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

E-mail: tristinamelani@gmail.com

ISSN 2964-6421

PENDAHULUAN

Setiap sektor, termasuk pemerintah, diminta untuk menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Indonesia harus mengubah organisasi lembaga publiknya untuk memenuhi tuntutan pemerataan pembangunan. Untuk mencapai tujuan seperti itu, pemerintah membuat UU No. 22 Tahun 1999, yang kemudian diubah menjadi UU No. 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. No. 33 Tahun 2004. UU ini membuka peluang kepada daerah untuk meningkatkan potensi lokal dan kinerja keuangan untuk mendukung kemandirian suatu daerah.

Pengendalian keuangan dan anggaran daerah adalah bagian utama dari pelaksanaan otonomi dan desentralisasi. Untuk menciptakan otonomi dan desentralisasi yang merata, konkrit, dan bertanggung jawab, pengelolaan keuangan daerah harus dapat mengawasi dan mengatur kebijakan keuangan daerah secara akuntabel, efektif, ekonomis, dan transparan. Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah harus diserahkan untuk evaluasi kinerja pengelolaan keuangan (Heri, 2020).

Meskipun ada banyak cara untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah, indikator yang paling dipakai adalah pertumbuhan ekonomi pada umumnya, pendapatan yang diperoleh pemerintah, pengeluaran pemerintah, surplus atau defisit anggaran, dan utang-utang pemerintah. Namun perlu digaris bawahi bahwa bukan hanya faktor ekonomi saja yang menentukan kinerja keuangan pemerintah, namun juga faktor politik dan sosial (Sri Winarsih *et al.*, 2023).

Kinerja keuangan suatu daerah adalah indikator penting untuk menilai kemampuan pemerintahan di daerah dalam mengelola sumber daya miliknya yang ditujukan untuk mencapai target pembangunan. Dalam konteks pemerintahan daerah, kinerja keuangan dapat diukur melalui efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Kabupaten Kediri, sebagai salah satu daerah di Provinsi Jatim, memiliki peran strategis dalam mengelola anggarannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kajian terhadap kinerja keuangan Kabupaten Kediri dari tahun ke tahun dapat memberikan proyeksi yang lebih konkrit mengenai efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Selama periode anggaran 2018 hingga 2023, Kabupaten Kediri mengalami berbagai perubahan dalam penerimaan pendapatan daerah dan pengalokasian belanja. Rasio antara pendapatan dan belanja sering digunakan sebagai alat untuk mengukur kemampuan pendapatan daerah dalam menutupi pengeluaran serta efisiensi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah (Diah dan Badruz, 2016).

Berdasarkan diskusi tersebut, analisis kinerja keuangan Kabupaten Kediri akan dilakukan dengan melihat rasio pendapatan dan belanja daerah selama periode tersebut. Diharapkan evaluasi ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang cara Kabupaten Kediri menggunakan sumber dayanya dan menemukan masalah dan peluang dalam pengelolaan anggaran selama 2018–2023. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja keuangan Kabupaten Kediri sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan untuk menghasilkan keseimbangan yang lebih baik antara pendapatan dan belanja di masa depan kelak. Diharapkan juga dari penelitian ini mampu membantu meningkatkan PAD di tengah persaingan yang semakin kompetitif.

METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Kediri selama 2018–2023, penelitian ini memakai pendekatan kualitatif & metode *study literature review*. Data yang dipergunakan termasuk laporan keuangan daerah (APBD), jurnal ilmiah, dan dokumen pemerintah yang relevan. Pencarian literatur dan dokumentasi laporan realisasi anggaran juga digunakan. Data dianalisis secara deskriptif dengan mengelompokkan dan membandingkan rasio keuangan tahunan, seperti rasio PAD terhadap total PD dan rasio belanja operasional terhadap total belanja. Validitas data dijamin dengan membandingkan data dari berbagai dokumen dan publikasi. Hasil penelitian diharapkan dapat menunjukkan seberapa mandiri keuangan Kabupaten Kediri dan seberapa efektif dia mengelola anggaran selama periode tersebut.

Rasio Derajat Desentralisasi

Pendapatan Asli Daerah disandingkan dengan total pendapatan daerah untuk mengetahui tingkat desentralisasi. Rasio ini menggambarkan seberapa besar sokongan PAD terhadap pendapatan keseluruhan daerah. Makin besar sokongan PAD, semakin kuat/mampu pemerintah daerah untuk menerapkan desentralisasi (Miftakur Rohmad *et al.*, 2023). Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$DD = \frac{PAD}{TOTAL PD} \times 100\%$$

Klasifikasi skala interval menentukan standar proporsi derajat dispersi: pertama, 00,00% sampai 10,00%, menunjukkan DD kinerjanya sangat kurang. Kedua, 10,01% sampai 20,00%, menunjukkan DD kinerjanya kurang. Ketiga, 20,01% sampai 30,00%, menunjukkan DD kinerjanya cukup. Keempat, 30,01% sampai 40,00% menunjukkan DD kinerjanya sedang. Kelima, 40,01% sampai 50,00%, menunjukkan DD kinerjanya baik. Dan yang terakhir keenam, jika lebih dari 50% berarti DD kinerjanya sangat baik.

Tabel 1. Rasio Derajat Desentralisasi Kab. Kediri Tahun 2018-2023

Sumber: Badan Pusat Statistika Kab. Kediri Tahun 2018-2023

Tahun	PAD	Pendapatan	DD	Kinerja
2018	476.905.008,82	2.867.950.508,39	16,63%	Kurang
2019	405.462.806,48	2.980.182.368,83	13,61%	Kurang
2020	494.413.404,88	2.835.332.942,71	17,44%	Kurang
2021	513.773.026,14	2.923.110.843,87	17,58%	Kurang
2022	649.630.917,16	3.059.858.480,15	21,23%	Cukup
2023	635.919.505,39	3.166.232.085,76	20,08%	Cukup
Rata-rata	529.350.778,15	2.972.111.204,95	17,81%	Kurang

Berdasarkan Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa pada periode 2018-2021 tingkat desentralisasi Kabupaten Kediri masih tergolong kurang. Derajat desentralisasi berada pada kisaran 13,61% hingga 17,58%, dengan kinerja daerah yang dinilai "Kurang" selama periode tersebut. Pada tahun 2022 dan 2023, derajat desentralisasi mengalami peningkatan signifikan, masing-masing mencapai 21,23% dan 20,08%, dengan penilaian kinerja daerah berubah menjadi "Cukup". Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022, diikuti dengan sedikit penurunan pada tahun 2023. Rata-rata derajat desentralisasi Kabupaten Kediri selama periode 2018-2023 adalah 17,81%, yang masih dikategorikan kurang. Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan pendapatan daerah, meskipun terjadi lonjakan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dapat diindikasikan juga Kab. Kediri kurang memiliki kemampuan desentralisasi dalam menghasilkan pendapatan daerah.

Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas PAD dianalisa dengan membandingkan hasil penerimaan PAD dengan target atau anggaran yang sudah ditetapkan (Rigel, 2017). Hal Ini menunjukkan seberapa kinerja pemerintah daerah memobilisasi PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010). rumus untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Rill Daerah}} \times 100\%$$

Penjelasan:

1. Sangat Efektif jika berada dipresentase >100%
2. Efektif berarti jika dipresentase 100%
3. Cukup Efektif jika berada dipresentase 90% - 99%
4. Kurang Efektif jika berada dipresentase 75% - 89%
5. Tidak Efektif jika berada dipresentase <75%

Tabel 2. Rasio Efektivitas Kab. Kediri Tahun 2018-2023

Sumber: DJPK Kemenkeu Kab. Kediri Tahun 2018-2023

Berdasarkan tabel 2, bisa dilihat bahwa hasil dari rasio efektivitas PAD di Kab. Kediri dari tahun 2018 sampai dengan 2023 terjadi kestabilan. Dapat dilihat pada tahun 2018 -2023 tetap berada diatas 100% dengan total rata-rata rasio efektivitas PAD yaitu sebesar 119,40% yang tergolong sangat efektif. Ini berarti pemerintah Kab. Kediri sudah sangat efektif dalam mengelola PAD nya. Dan diharapkan ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

Tahun	PAD (Miliar)	Target Penerimaan PAD (Miliar)	Rasio Efektivitas	Kinerja
2018	452,81	476,91	105.32%	Sangat Efektif
2019	391,00	457,76	117.08%	Sangat Efektif
2020	424,92	494,41	116.32%	Sangat Efektif
2021	425,69	513,77	120.69%	Sangat Efektif
2022	454.,1	649,63	143.05%	Sangat Efektif
2023	500,39	570,24	113.96%	Sangat Efektif
Rata-rata			119.40%	Sangat Efektif

Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung (BL dan BTL)

Rasio Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) terhadap Total Belanja

$$\text{Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria rasio menetapkan bahwa kinerja belanja langsung dinilai baik jika rasio Belanja Langsung > Rasio Belanja Tidak Langsung. Dan jika Rasio Belanja Langsung < Rasio Belanja Tidak Langsung, maka kinerja belanja langsung dianggap kurang baik (Natalia dan Mega, 2023).

Tabel 3. Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kab. Kediri Tahun 2018-2023

Tahun	Belanja Langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Total Belanja (Rp)	BL (%)	BTL (%)	Kinerja
2018	1.149.138.595,11	1.589.169.606,00	2.738.308.201,11	41,96%	58,03%	Kurang Baik
2019	1.611.721.032,00	1.884.740.519,18	3.496.461.551,18	46,09%	53,9%	Kurang Baik
2020	978.032.109,08	1.854.252.536,97	2.832.284.646,05	34,53%	65,46%	Kurang Baik
2021	1.052.708.098,83	1.884.716.353,08	2.937.424.451,91	35,83%	64,16%	Kurang Baik
2022	1.177.621.364,64	1.935.099.363,90	3.112.720.728,54	37,83%	62,16%	Kurang Baik
2023	1.379.045.461,18	1.908.682.224,76	3.287.727.685,94	41,94%	58,05%	Kurang Baik
Rata-rata	1.224.711.110,14	1.842.776.767,32	3.067.487.877,46	39,92%	60,07%	Kurang Baik

Sumber: Badan Pusat Statistika Kab. Kediri Tahun 2018-2023

Tabel 3 menunjukkan hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa rasio belanja langsung dan tidak langsung terhadap total belanja Kabupaten Kediri akan menurun dari tahun 2018 hingga 2023. Rata-rata belanja langsung sebesar 39,92% lebih rendah daripada rasio belanja tidak langsung sebesar 60,7%, menunjukkan bahwa belanja yang dianggarkan oleh Kabupaten Kediri tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

KESIMPULAN

Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa : 1) Dilihat dari rerata perhitungan Derajat Desentralisasi pada tahun 2018-2023 di kabupaten Kediri adalah 17,81%, yang masih dikategorikan kurang. 2) Dapat dilihat dari rasio efektivitas kabupaten Kediri pada tahun 2018 -2023 tetap berada diatas 100% dengan total rerata rasio efektivitas PAD yaitu sebesar 119,40% yang tergolong sangat efektif. Ini berarti pemerintah Kab. Kediri sudah sangat efektif dalam mengelola PAD. 3) Rata-rata belanja langsung tercatat sebesar 39,92%, yang lebih minim daripada rasio belanja tidak langsung yang mencapai 60,07%. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tidak terkait secara langsung dengan anggaran yang dialokasikan Kabupaten Kediri.

REFERENSI

- Awani, Febi M dan Hariani, Swarmilah. (2021). Analisa Rasio Kemadirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 95-102. DOI: <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>.
- Fathah, Rigel Nurul. (2017). Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *EBBANK*, 8(1), 33-48.
- Harahap, Heri F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34-38. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>.
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif DPRD dan Masyarakat dalam Mengambil Keputusan Ekonomi Sosial dan Politik. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN.
- Nurdiwaty, Diah dan Badruz Zaman. (2016). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Di KotaKediri. *Ekonomika-Bisnis*, 7(1), 31-40. DOI: <https://doi.org/10.22219/jibe.v7i1.3382>.
- Ramadana, Sri Winarsih, dkk. (2023). Determinasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1831-1840. DOI: <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590>.
- Rohmad, Miftakhur, dkk. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo. *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, 5(1), 17-35. DOI: <https://doi.org/10.55606/ai.v5i1.285>.

- Selvi, Natalia Mega dan Mega Tunjung Hapsari. (2023). Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Sebelum, Saat, dan Pasca Pandemi COVID-19 (Tahun 2017-2022). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing*, 4(1), 205-114. DOI: <https://doi.org/10.56696/jaka.v4i1.8305>
- Sriningsih, Siti, dkk. (2021). Analisis Keserasian Belanja Modal dan Belanja Operasional pada Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Kompetitif: Media, Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Akuntansi*, 7(1), 39-55. <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/kompetitif/article/view/352>
- Syamsuddin, Indah, dkk. (2022). Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020. *Journal of Management*, 5(2), 170-177. DOI: <https://doi.org/10.2568/yum.v5i2.1557>
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah